

Pengantar: Kebijakan Berbasis Bukti

1

Kebijakan Publik dan Penelitian Sosial

- Proses Kebijakan: Anggapan bahwa proses kebijakan merupakan suatu chaos tujuan dan kecelakaan. Sama sekali bukan persoalan pelaksanaan dari apa yg disebut keputusan melalui strategi yang terpilih.
- Relevansi: Kebanyakan penelitian kebijakan tidak relevan
- Pembuat kebijakan menganggap "penelitian" berlawanan dg "tindakan"
- Efektivitas biaya: Biaya yg dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yg dihasilkan penelitian.

2

Last frontier?

- Keinginan untuk mendapatkan pemahaman dan kontrol yang lebih baik terhadap realitas yang rumit, bukan merupakan area rutin penyesuaian inkremental.
- Frustrasi terhadap masalah-2 endemik yang sulit dipecahkan, dimana dana yang sangat besar telah digunakan.
- Dibutuhkan investasi pengumpulan data dan benchmarking untuk mengukur kinerja masa depan.

Misalnya:

- "what works" dalam penanganan kemiskinan?
- kontrol kejahatan dan residivisme?
- penyakit yang dapat dicegah?
- penyalahgunaan obat & alkohol?
- pelayanan?

3

Menuju “relevansi”

- Pemerintah sebaiknya mendasarkan kebijakan/programnya pada pengetahuan yg “relevan” (“pengetahuan yg dapat digunakan”)
- Penggunaan penelitian untuk membuat kebijakan akan dapat menolong banyak jiwa, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup.
- Analisis kebijakan dan penelitian “Berbasis-bukti”, merupakan pengetahuan yg “relevan” dan “berguna”.
- Ada kaitannya dengan penekanan pada
 - pemecahan masalah
 - analisis resiko dan respon
 - fokus kepada “what works?”

4

“Relevan” ?

- Pendekatan “berbasis-bukti” ini diperlukan karena adanya keterpautan dengan minat manajerial dan teknokratik pada *efisiensi dan efektivitas*:
 - pilihan-2 apa yg akan “memberikan kebaikan”?
 - bagaimana mendapatkan pemanfaatan dana yg lebih bernilai ?
 - bagaimana mempromosikan inovasi dan kompetisi untuk meningkatkan produktivitas?
 - bagaimana cara yang lebih baik untuk memberikan hasil yg baik dan bermanfaat?
 - secara singkat, what works?

5

Apakah Sudah Cukup?

- Apakah masalah sosial endemik merupakan tanda dari adanya “kesenjangan” data dan pengetahuan dasar?
- Dan jika kita memiliki data sosial yang lebih baik, akankah hal ini memberikan jalan cepat terhadap solusi kebijakan yang baik?
- Hal-2 lain yang juga penting selain kesenjangan data:
 - Kurangnya pemahaman terhadap hubungan diantara berbagai trend/proses?
 - Kurangnya pemahaman terhadap implementasi program?
 - Kurangnya pemahaman terhadap persepsi dan motif pemangku kepentingan?
 - Kurangnya pemahaman terhadap bagaimana melakukan aliansi dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan yang bervariasi?

6

Jenis Pengetahuan dalam Analisis Kebijakan

- Kebijakan didasarkan pada berbagai basis data.
- Paling tidak ada tiga pengetahuan yang penting bagi suatu kebijakan:
 - political know-how
 - informasi teknis dan ilmiah
 - pengalaman praktis dan profesional
- **1. Pengetahuan Politik** tentang strategi, agenda-setting, prioritas, taktik, ideologis, nilai-2, komunikasi, akuntabilitas, dukungan, trade-offs, etc. pengetahuan seperti ini terutama berada pada para politisi, parpol, kelompok terorganisasi, media dll.

7

Lanjutan

- **2. Peng. Ilmiah** (berbasis penelitian) atas kondisi masa lalu, saat ini dan trends, serta hub kausal yang menerangkan kondisi dan trend. Review sistematis tentang apa yang cara yang berhasil dalam bidang sosial tertentu telah digunakan secara jitu misalnya pada bidang kesehatan dan program sosial. Penggunaan data kuantitatif (dan kualitatif) diperlukan untuk membantu menerangkan adanya perubahan.
- **3. Peng.praktis** tentang praktisi, manajer lapangan, manajer program dan pelaksana. Mereka adalah orang-2 yang bergulat dengan masalah-2 efektivitas dan implementasi .

8

Framing isu dan agenda

- Issue dan agenda tidak muncul dari fakta yang telanjang.
- Problem-framing dan agenda-setting.
- Apakah isu dan masalah yg berharga untuk diteliti? Dalam praktek tergantung kepada:
 - persepsi terhadap krisis dan urgensi
 - peran mandat politik dan prioritas
 - peran dari penilaian profesional/manajerial (ahli manajemen, birokrat)
 - sejarah isu dan organisasi
 - pembentukan nilai dan opini publik.
- Masalah diantara pandangan "expert" dan masyarakat tentang solusi yang dapat diterima: suatu pemecahan masalah yang diusulkan para ahli gagal diadopsi karena kuatnya lobi

9

Masalah, isu dan agenda

- Definisi masalah memiliki implikasi untuk mengistimewakan bukti-2 tertentu yg dianggap lebih relevan, sedangkan yang lain disisihkan.
- Artinya ada kalanya suatu kebijakan "evidence-proof" dalam arti "basis" bukti yang digunakan sempit dan diwarnai komitmen politik.
- Konsep-2 tertentu memiliki dampak sosial (misal ambang eligibilitas program – kemiskinan, disabilitas, pengungsi dll)
- Definisi masalah dan fokus sangat penting dalam mendukung diadakannya penelitian dan konsultasi

10

Mempengaruhi Kebijakan

Konteks Politik:

Proses kebijakan dan penelitian merupakan proses politik dari awal sampai akhir. Faktor kunci al:

- tingkat kebebasan politik
- kontestasi politik, tekanan internasional dan vested interest
- sikap dan insentif pembuat kebijakan, ruang untuk bermanuver, sejarah lokal, dan hub kekuasaan

11

Mempengaruhi Kebijakan

- Bukti: Kredibilitas dan Komunikasi
- Kualitas penelitian memiliki peranan yg penting. Tidak saja berhubungan dengan relevansinya, tapi juga kegunaan operasional dari ide yang muncul dari hasil penelitian
- jika pendekatan baru diujicobakan dan hasilnya menunjukkan dg jelas nilai dari pilihan baru tersebut.
- jika penelitian tersebut menyediakan solusi bagi masalah yg ada

12

Lanjut

- Proses komunikasi memiliki peran penting:
 - sumber dan pembawa pesan/bukti
 - cara mengemas dan membuat target dari pesan yang dihasilkan
 - pendekatan interaktif akan lebih membawa hasil

13

Mempengaruhi Kebijakan

- Link: Pengaruh dan Legitimasi
- Keterpautan sangat penting dalam memberikan pengaruh. Jejaring seperti:
 - komunitas kebijakan
 - komunitas epistemik
 - koalisi advikasi
- Untuk itu diperlukan: kepercayaan, legitimasi dan keterbukaan jejaring.

14

Mempengaruhi Kebijakan

- Pengaruh Eksternal:
 - Dampak pol dan proses internasional, serta dampak kebijakan umum pemberi donor.
 - Trend terhadap demokratisasi dan liberalisasi, serta dukungan terhadap masyarakat sipil

15

Kebijakan yg dihasilkan

Perlu diperjelas:

- 1. apakah tujuan dan arah kebijakan dengan jelas dimengerti dan didukung pemangku kepentingan? Apakah adanya ketidaksepakatan ditangani dengan baik dan penyesuaian disetujui? Perspektif merupakan bukti yang krusial.
- 2. Seberapa efektif proses governance (akuntabilitas, peran, decision-making, suberdaya dll)? Adakah keyakinan dan kepercayaan jangka panjang dalam pola yang berkelanjutan?
- 3. Apakah hasil jangka pendek/medium/panjang yang ingin dicapai dijelaskan? Apakah hasil dari program berkelanjutan dalam jangka panjang?

16
